

Anies - Cak Imin Janji Angkat Menteri dari Muhammadiyah

JAKARTA (IM) - Calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar janji akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah jika mereka menang dalam Pemilu 2024.

Hal ini ditegaskan pasangan calon nomor urut 1 ketika menjawab pertanyaan dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menjadi moderator acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Disiarkan TV Mu, Rabu (22/11).

"Kalau Mas Anies dan Gus Imin jadi Presiden dan Wakil Presiden, apakah akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah?," kata Mu'ti disambut meriah para hadirin.

Anies tersenyum mendengar pertanyaan itu, sedangkan Cak Imin bertepuk tangan. Anies kemudian menjawab dengan canda: "Pertanyaan berikutnya apakah Pak Mu'ti masuk dalam daftarnya?," tuturnya disambut gelak tawa hadirin.

Anies kemudian menyebutkan pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo saja mengangkat satu menteri dari kalangan Muhammadiyah. Jika dia terpilih jadi Presiden, Anies memastikan menteri dari kalangan Muhammadiyah pasti akan ditunjuk.

"Kalau Pak Jokowi saja memberikan tempat, apalagi kami?" ucap Anies.

"Jadi konkret ya, kalau Pak Anies dan Cak Imin jadi PResiden dan Wakil Presiden, akan ada menteri dari Muhammadiyah," sambung Abdul Mu'ti lagi.

Diketahui saat ini menteri dari kalangan Muhammadiyah yang berada di Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK),

Muhadjir Effendy.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga turut meyakinkan para petinggi PP Muhammadiyah bahwa kabinetnya kelak pasti akan diisi oleh perwakilan PP Muhammadiyah.

"Setiap periode kepemimpinan nasional, kayaknya sih enggak pernah berani ninggalin menteri dari Muhammadiyah. Apalagi kami berdua," tuturnya.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dialog terbuka untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Kamis (23/11).

Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (24/11).

Dalam sesi Anies-Muhaimin terdapat lima panelis yang dihadirkan. Pertama adalah Ulama Intelektual Professor Saad Ibrahim yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Kedua, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi professor Sofyan Anif. Mantan Ketua Komisi Yudisial dan juga Guru Besar Program Studi Ilmu Hukum UMS Aidi Fitrijadi, Peneliti Senior Lipi Professor Siti Zuhro dan terakhir Guru Besar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Professor Zuly Qodir. ● **mei**

Visi-Misi Prabowo-Gibran Sesuai Tantangan Terbesar Indonesia

JAKARTA (IM) - Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, visi misi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto disusun dengan melihat tantangan terbesar di Indonesia. Misalnya terkait gizi anak, lapangan kerja, pendidikan hingga perubahan iklim.

Melihat tantangan yang begitu besar, tutur Dradjad perubaha iklim ditempatkan sebagai tantangan pertama.

"Saya jelaskan kepada adik-adik mahasiswa FE UI (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) nanti akan banyak merasakan dampaknya. Itu sebabnya Visi Misi dan Program Prabowo-Gibran kita susun dengan mitigasi perubahan iklim sebagai salah satu peubah kuncinya," tutur Dradjad, Rabu (22/11).

Begitu juga dengan gizi bagi balita dan anak. Ia menyebut, visi dan misi Prabowo-Gibran yaitu berupaya menaikkan gizi anak Indonesia sejak dari kandungan. Dengan asupan yang lebih terjamin, perkembangan otak dan fisik Generasi Alpha dan Beta menjadi lebih baik. Bentuk nyatanya bisa berupa makan siang dan susu gratis dan bantuan bagi ibu hamil.

Dengan visi ini, maka negara juga menjadi off-taker telur, susu, sayur dan lain-lain bagi peternak (sapi, ayam) dan petani. Sehingga membuka lapangan kerja bagi rakyat di atas garis kemiskinan," ujar Dradjad.

Ia menyebut visi-misi di atas menjadi salah satu keynesian stimulus dengan *multiplier output* dan *employment*. Berdasarkan hitungan kasar angka sementara, untuk periode satu dua tahun berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi 0,6 persen di atas baseline.

Kemudian ditambah beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) lain seperti sekolah unggulan, bantuan negara untuk rumah bagi milenial, instensifikasi dan ekstensifikasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kredit milenial untuk startup, program perumahan bagi Milenial, dan sebagainya.

Hal itu menurut dia menunjukkan betapa seriusnya Prabowo-Gibran berusaha memaksimalkan potensi bonus demografi, dimana mencapai dua pertiga dari penduduk usia produktif Indonesia. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



ICW Sebut Firl Bahuri "Playing Victim", Seolah-olah Jadi Korban Kriminalisasi

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, Masyarakat sudah tahu bagaimana rekam jejak Firl di KPK, terutama integritasnya yang dinilai buruk.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) sedang melakukan *playing victim* atau memainkan peran sebagai korban kriminalisasi.

KPK Setor Rp153,7 Miliar Hasil Rampasan Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang senilai Rp153,7 miliar ke kas negara. Uang tersebut merupakan rampasan dari perkara korupsi pengadaan Helikopter AW-101 dengan terpidana John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh.

Penyerahan uang rampasan tersebut setelah perkara yang dimaksud mempunyai hukum tetap atau inkrah.

"Jaka Eksekutor Leo Sukoto Manalu melalui biro keuangan telah selesai melaksanakan putusan tingkat akhir dari Majelis Hakim Tipikor pada Mahkamah Agung RI atas nama Terpidana John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh dengan cara memasukkannya ke Lapas Klas I Sukamiskin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/11).

Ali menyebutkan, uang yang disetorkan lembaga antirasuah itu merupakan bagian dari barang bukti yang disita terkait proses penyidikan perkara pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017.

"Melalui penyctoran ke

kas negara, uang rampasan dimaksud menjadi salah satu bukti real dilaksanakan dan dicapainya aset recovery dari penanganan perkara oleh KPK," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, KPK menjebloskan Dirut PT Diratama Jaya Mandiri John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh ke Lapas Sukamiskin. Hal tersebut lantaran yang bersangkutan terbukti melakukan korupsi dalam pembelian Helikopter Agusta Westland (AW)-101.

"Hari ini (21/11) Jaka Eksekutor KPK Syarkiyah, telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dengan Terpidana John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh dengan cara memasukkannya ke Lapas Klas I Sukamiskin," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan Selasa (21/11) malam.

Irfan akan ditahan di Lapas Sukamiskin selama 10 tahun, sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim memvonis Irfan dengan hukuman 10 tahun kurungan badan. Selain itu, ia juga didenda Rp1 miliar subsidi enam bulan kurungan.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, peran itu dimainkan Firl Bahuri di tengah eskalasi penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"ICW merasa punawirawan jenderal bintang tiga kepolisian itu sedang memainkan

peran seolah-olah dirinya adalah korban kriminalisasi," kata Kurnia kepada wartawan, Selasa (21/11) malam.

Kurnia mengaku telah mencermati penjelasan Firl terkait perkembangan proses hukum dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap SYL yang berlangsung sekitar 20 menit. Dalam pemaparan itu, Firl menggunakan diksiksi seperti, kondisi abnormal, butuh jeda, merasa asing di Mabes Polri, hingga serangan balik koruptor.

Pada, Kurnia mengatakan, strategi semacam itu tidak lagi relevan karena masyarakat sudah mengenal Firl Bahuri.

"Masyarakat sudah tahu bagaimana rekam jejak Firl di KPK yang terbilang sangat buruk, terutama berkaitan dengan integritasnya," ujar Kurnia.

Ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun tangan mengambil alih penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo. Menurut Kurnia, kinerja Polda Metro Jaya mengenai kasus ini sudah sangat berlarut-lurut dan lambat.

"Sederhananya, apa yang dilakukan oleh Polda hanya terlihat gagah di awal saja, namun melempem pada ujung penuntasan perkara ini," kata

REVISI UU ITE SEPAKAT DIBAWA KE SIDANG PARIPURNA DPR

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kiri) memberikan dokumen hasil pendapat akhir mini pemerintah kepada Ketua Komisi I DPR Meutya Viafa Hafid (kanan) pada raker dengan Komisi I DPR terkait hasil pembahasan materi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11). Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Andhi Pramono Didakwa Terima Gratifikasi senilai Rp58,9 Miliar

JAKARTA (IM) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, menerima gratifikasi dengan total nilai Rp58,9 miliar yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing.

"Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2023, telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp50.286.275.189,79 (Rp50,2 miliar) dan USD264,500 atau setara dengan Rp3.800.871.000,00 (Rp3,8 miliar) serta SGD409,000 atau setara dengan Rp4.886.970.000,00 (Rp4,8 miliar) atau sekira jumlah tersebut," kata JPU saat membacakan dakwaan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

"Yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," sambung JPU.

Jika ditotalkan, jumlah mata uang rupiah dan asing itu senilai Rp58.974.116.189.

Jumlah tersebut, Andhi terima dari 2012 saat dia

ditunjuk menjadi Pj. Seksi Penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga 2023 saat ia menjabat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Makassar pada tahun 2021-2023.

JPU menyebutkan, Andhi menerima gratifikasi tersebut secara langsung dan melalui transfer rekening.

Untuk memuluskan akal bulusnya, Andhi pun tidak hanya menggunakan nomor rekening atas nama pribadinya.

"Bahwa penerimaan gratifikasi tersebut ada yang diterima Terdakwa secara langsung dan ada pula yang melalui rekening bank," ujarnya.

JPU mencatat, setidaknya terdapat sembilan nomor rekening atas nama orang lain yang terdakwa pakai untuk menerima setoran tersebut.

Atas perbuatannya, JPU menyangka Andhi melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. ● **mei**



APEL GELAR PASUKAN PENGAMANAN PEMILU 2024

Kaskoarmada II Laksma TNI Isswarto (kiri) menginspeksi pasukan saat Apel Gelar Pasukan dan Manuver Lapangan Latihan Pengamanan Pemilu 2024 di Koarmada II, Surabaya, Jatim, Rabu (22/11). Kegiatan tersebut untuk memastikan kesiapan personel TNI AL beserta alutsistanya dalam melakukan pengamanan Pemilu 2024.